

**“Telaah Tata Kota Kabupaten Purbalingga
Tahun 1925-1949”**

JURNAL



Oleh :
RISDA AMANDA
13406241007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

TELAAH TATA KOTA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 1925-1949

Penulis 1 : Risda Amanda

Penulis 2 : Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd

Abstrak

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah dalam Karesidenan Banyumas memiliki struktur dan tata kota yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sejarah awal mula berdirinya kota kabupaten Purbalingga; (2) tata kota Purbalingga tahun 1925-1949; dan (3) pengaruh tata kota kabupaten Purbalingga terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik Purbalingga tahun 1925-1949.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dari Kuntowijoyo. Implementasinya meliputi pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi.

Penelitian mengenai telaah tata kota kabupaten Purbalingga tahun 1925-1949 diperoleh hasil sebagai berikut; (1) Purbalingga berawal dari sebuah daerah yang dikelilingi hutan dan tidak memiliki banyak penduduk. Purbalingga kemudian berkembang pesat menjadi desa, kadipaten, hingga kota kabupaten. Adanya pengaruh dari masa pra-aksara, Hindu-Budha, Islam, masa kolonial, hingga masa kemerdekaan berperan dalam perkembangan Purbalingga tersebut. (2) Tata kota kabupaten Purbalingga tahun 1925-1949 hampir sama dengan struktur dan pola tata kota di Banyumas, yang merupakan ibukota karesidenan Banyumas. Hal yang menarik adalah, meskipun memiliki pola dasar yang sama dengan Banyumas, tata kota kabupaten Purbalingga sedikit melenceng dari konsep *Mandala Jawa*, dimana poros sakral pengawasan seharusnya mengarah dari Selatan ke Utara, tapi di Purbalingga justru Selatan ke Timur. Hal tersebut dikarenakan Belanda ingin mengurangi kekuasaan dan atau pengaruh penguasa setempat, yakni bupati atau *regent* Purbalingga, Aryo Sugondo. (3) Pengaruh tata kota kabupaten Purbalingga tahun 1925-1949 berdampak pada aspek politik, sosial dan ekonomi. Adanya intervensi dalam birokrasi pemerintahan berupa pengawasan melalui asisten residen, kelas-kelas sosial, kehidupan semi-militer, serta kebijakan ekonomi yang dipegang penuh oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Kata Kunci : tata kota, kabupaten Purbalingga, tahun 1925-1949

A STUDY OF THE CITY PLANNING OF PURBALINGGA REGENCY IN 1925-1949

Primary Author : Risda Amanda
Additional Author : Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd

Abstract

Purbalingga Regency, which is one of the areas within Banyumas Residency, has a distinctive structure and city planning. Through this study the author aimed to investigate: (1) the early history of the establishment of the city of Purbalingga Regency, (2) the city planning of Purbalingga in 1925-1949, and (3) the impact of the city planning of Purbalingga Regency on the social, economic, and political conditions of Purbalingga in 1925-1949.

This study used Kuntowijoyo's critical historical method. The implementation of such a critical historical method included the topic selection, source collection, internal and external source criticism, interpretation, and presentation in the form of history writing.

The results of the study of the city planning of Purbalingga Regency in 1925-1949 were as follows. (1) Purbalingga originated from a forest-enclosed area and did not have many inhabitants. Purbalingga then developed rapidly into villages, *kadipaten*, and a regency city. The influences of the pre-literate, Hindu-Buddhist, Islamic, colonial, and independence periods played roles in the development of Purbalingga. (2) The city planning of Purbalingga Regency in 1925-1949 was similar to the structure and pattern of the city planning in Banyumas, which was the capital of Banyumas Residency. The interesting thing was that, although it had the same basic pattern as Banyumas, the city planning of Purbalingga Regency slightly deviated from the concept of *Mandala Jawa*, where the sacred axis of control should lead from South to North, but in Purbalingga it was South to the East. This was because the Dutch wanted to reduce the power and/or influence of the local authority, namely the regent of Purbalingga, Aryo Sugondo. (3) The city planning of Purbalingga Regency in 1925-1949 had an impact on several aspects, namely political, social, and economic aspects. The existence of intervention in the government bureaucracy was in the form of supervision through resident assistants, social classes, semi-military life where indigenous people were trained hard and even during the Japanese administration they were obliged to bow when they met the Japanese army, and the economic policy totally controlled by the Dutch-Indies government. It was not until the time of the Japanese administration and that of the Republic of Indonesia that indigenous people were much involved in bureaucratic structures as government officials.

Keywords: *city planning, Purbalingga Regency, 1925-1949*

Pendahuluan

Dinamika sebuah tempat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah nasional bangsa ini. Sejarah perkotaan bertugas menceritakan kisah yang tersimpan dari tiap-tiap kota, baik kota-kota besar yang bahkan sudah terkenal sejak zaman kuno, maupun kota-kota yang lebih kecil. Sejarah perkotaan tidak hanya memiliki kajian telaah untuk identitas suatu kota saja, tapi lebih dari itu. Banyak bahasan yang bisa diteliti sejarawan dalam kaitannya dengan kondisi kota. Gaya hidup masyarakat, kondisi sosial ekonomi, corak kebudayaan, hingga bahasa pun menarik untuk diteliti. Purbalingga menjadi salah satunya.

Purbalingga adalah kabupaten di bagian sebelah baratdaya Semarang, ibukota provinsi Jawa Tengah. Mulanya hanya berupa desa kecil dengan penduduk yang masih sedikit. Lama-kelamaan Purbalingga berkembang terus dari desa, kemudian *kadipaten* pada masa Islam hingga VOC, dan puncaknya menjadi *regentschap* atau kabupaten saat pemerintahan Hindia-Belanda.

Dalam kajian sejarah perkotaan, aspek spasial dan temporal yang penulis lakukan dalam penelitian historis ini adalah kaitan antara telaah tata kota Purbalingga pada rentang waktu 1925-1949. Mengenai aspek spasial, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kaitan ruang antara kota Purbalingga sebagai salah satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari karesidenan Banyumas. Melihat dari segi perkembangan kebudayaannya, tata kota Purbalingga memiliki ciri-ciri yang khas sebagai bagian dari Wilayah Daerah Banyumas (Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya).

A. Kajian Pustaka

Menurut buku panduan penulisan tugas akhir skripsi yang ditulis oleh Tim Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNY, kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Kajian pustaka dapat berupa buku yang sesuai dengan topik ataupun masalah. Sehingga dalam penelitian ini kajian pustaka akan didasarkan pada topik yang dibahas, yaitu mengenai Purbalingga tahun 1925-1949 dalam perspektif sejarah perkotaan. Adapun titik awal sejarah perkotaan yang akan menjadi *main role* penelitian ini adalah mengenai tata kota Purbalingga, terutama di tahun 1925 sampai 1949.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang disebut tata kota adalah pola tata perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah kota dalam membangun, misalnya jalan, taman, tempat usaha, dan tempat tinggal agar kota itu tampak apik, nyaman, indah, berlingkungan sehat, dan terarah perluasannya pada masa depan.

Beberapa pengertian atau pendapat ahli terkadang menyebut tata kota sebagai tata ruang kota. Tata kota yang termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1996

tertulis sebagai Rencana Tata Ruang Kota. Adapun isinya mengenai hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang, meliputi : ruang, tata ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah, kawasan, dan kawasan pedesaan.

Dari kajian diatas maka ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji perspektif sejarah perkotaan dengan pembahasan Purbalingga sebagai pusat kota serta pembangunan infrastruktur dan atau sarana-prasarana pendukung lainnya.

B. Metode Penelitian

Kuntowijoyo menjelaskan ada lima tahap dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan penyajian atau historiografi. Tahap awal yakni pemilihan topik didasari oleh dasar kedekatan emosional dan intelektual. Kedekatan emosional dalam penelitian ini karena penulis adalah masyarakat Purbalingga dan ingin mengangkat kekayaan sejarah Purbalingga dari aspek perkotaan. Sedangkan kedekatan intelektual dilatarbelakangi oleh ketersediaan sumber dalam penelitian ini, baik lisan maupun tertulis.

Pengumpulan sumber atau heuristik dibagi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari arsip yang termuat dalam *staatsblad* (lembaran negara) pemerintah Hindia-Belanda tahun 1929 serta buku kumpulan arsip *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)* yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta. Sumber sekunder berasal dari berbagai macam literatur baik buku maupun karya ilmiah, serta narasumber untuk sumber lisan.

Verifikasi atau kritik sumber dilakukan setelah sumber-sumber yang diperlukan terkumpul. Kritik diperlukan untuk validitas atau keabsahan dari sumber yang diperoleh, sehingga hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Tahapan ini ada dua, yaitu kritik ekstern yang bertujuan untuk menentukan autentitas sumber, baik keaslian sumber, tanggal, waktu pembuatan, serta pengarang ; dan kritik intern yang bertujuan untuk menentukan kredibilitas sumber, baik isi, sumber, atau dokumen, meliputi bahasa dan situasi pengarang, gaya dan ide.

Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh setelah dilakukan kritik sehingga dapat memberikan kesatuan berupa bentuk peristiwa lampau, yang dalam hal ini tentang Telaah Tata Kota Kabupaten Purbalingga Tahun 1925-1949. Setelahnya, barulah hasil penelitian disajikan secara utuh dalam bentuk karya ilmiah sejarah atau historiografi.

Pembahasan

1. Sejarah Awal Mula Berdirinya Kota Kabupaten Purbalingga

Purbalingga menyimpan sejarah yang cukup panjang sebelum akhirnya menjadi sebuah kabupaten. Bermula dari sebuah wilayah kecil dan belum banyak penghuni, namun memiliki beragam tinggalan berupa artefak kuno dari zaman Megalithikum. Perkembangan wilayah Purbalingga semakin terasa ketika pengaruh dari luar masuk ke Indonesia.

Penyebaran agama Hindu-Budha mengawali perubahan Purbalingga, tidak hanya dari segi wilayah saja tetapi juga kehidupan masyarakatnya. Penamaan “Purbalingga” sendiri jika ditarik ke masa ini maka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *purba* dan *phallus*. Di masa ini pula, mulai ditemukan artefak berupa inkripsi yang banyak ditemukan cukup berdekatan dengan artefak lingga-yoni.

Memasuki pengaruh agama Islam, kondisi Purbalingga kembali berubah. Bahkan, kali ini perubahannya jauh lebih banyak dan lebih terasa dibanding masa sebelumnya. Pengaruh kerajaan-kerajaan Islam tetangga, terutama Kerajaan Pajang, salah satunya berdampak pada bentuk wilayah Purbalingga. Jika sebelumnya Purbalingga lebih dikenal sebagai suatu desa, maka pada masa Islam ini statusnya berubah menjadi *kadipaten*. Hubungan bilateral dengan kerajaan Islam lain pun mulai terjalin. Lambat laun Purbalingga menjadi ramai tidak hanya oleh penduduk pribumi, tetapi juga pedagang dan musafir dari Arab.

Selanjutnya, saat memasuki masa pendudukan asing di Indonesia, baik oleh Belanda, Inggris, hingga Jepang, juga turut serta mewarnai perjalanan Purbalingga. yakni masa kolonialisme dan imperialisme turut mewarnai perubahan Purbalingga. Aspek yang sangat terasa adalah terjadinya pemindahan ibukota kabupaten yang awalnya terletak di Karanglewas ke Purbalingga.

Tidak lama berselang dari peristiwa pemindahan ibukota kabupaten, Purbalingga turut andil dalam peristiwa Perang Mangkubumen dan Perang Diponegoro. Kedua perang tersebut selain merugikan kedua belah pihak (pribumi dan Belanda) juga membuat status Purbalingga berubah.

Status Purbalingga yang awalnya merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta, menjadi wilayah berdikari, yakni sebuah kabupaten sendiri tergabung dengan kabupaten lainnya di wilayah karesidenan yang telah dibagi pemerintah Belanda. Pengawasan pemerintahan pun digantikan oleh asisten residen yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jendral.

Selepas pendudukan oleh Belanda, pemerintahan diambil oleh Jepang. Pada masa ini keadaan Purbalingga kurang diketahui sebab sulitnya menemukan sumber tertulis selama pendudukan Jepang. Hal

yang diketahui saat pendudukan Jepang adalah fakta bahwa sikap mereka tidak lebih baik dari Belanda. Bahkan kehidupan masyarakat cenderung lebih kearah militer akibat gembungan dari Jepang.

Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, berakhirilah masa pendudukan bangsa asing di Indonesia, termasuk Purbalingga. Perkembangan selanjutnya Purbalingga mengikuti keputusan pemerintah pusat, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayangnya, karena masih dalam masa transisi, pemerintah RI juga belum banyak memberi dampak bagi Purbalingga.

Selain karena keadaan yang masih *chaos*, Purbalingga juga diharuskan turut andil dalam pertempuran melawan pasukan Belanda dalam Agresi Militer. Kedudukan pemerintah kabupaten Purbalingga semakin pelik karena Belanda berhasil masuk ke Purbalingga melalui jalur utara (Pemalang, dan sekitarnya). Baru setelah pertempuran akhirnya dimenangkan oleh Indonesia, dan diperkuat dengan keputusan dalam Konferensi Meja Bundar bulan Desember 1949, Purbalingga perlahan mulai tertata kembali.

2. Telaah Tata Kota Kabupaten Purbalingga Tahun 1925-1949

1) Kota dan Kabupaten

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjelaskan kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan bahwa kota adalah suatu wadah yang memiliki batasan administratif wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Peraturan tersebut kemudian direvisi dalam Peraturan Mendagri nomor 2 tahun 1987 yang menyatakan kota sebagai pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

Mengenai definisi kabupaten, penulis juga mengambil bahan dari literatur sesuai dengan pendekatan dan ilmu yang relevan dalam penelitian. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selama masa pemerintahan Hindia-Belanda, kabupaten disebut *regentschap*. Istilah tersebut berasal dari *regent* yang merupakan sebutan untuk bupati. Daerah yang

dipimpin oleh bupati inilah yang kemudian dikenal sebagai kabupaten atau *regentschap*.

2) **Gambaran Umum Purbalingga**

Purbalingga merupakan salah satu dari 35 DATI (Daerah Tingkat) II di provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pengembangan bagian barat. Purbalingga memiliki bentangan alam maupun non-alam untuk menggambarkan daerahnya. Purbalingga termasuk dalam wilayah Karesidenan Banyumas dan sering juga disebut kota *braling*. Purbalingga berbatasan langsung dengan kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, kabupaten Pemasang di sebelah utara, serta kabupaten Banyumas di sebelah barat dan selatan.

Secara astronomis Purbalingga terletak pada posisi antara 109 derajat 13 menit dan 109 derajat 35 menit bujur timur, serta 7 derajat 10 menit dan 7 derajat 29 menit lintang selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan adalah 35,7 km, serta luas wilayahnya adalah 76.640 ha (Sasono, 1993: 10).

Sementara itu, dari segi geografis Purbalingga memiliki ketinggian yang beraneka ragam antara 23 m sampai dengan 3.428 m dari permukaan laut. Titik tertinggi dari kabupaten Purbalingga adalah Gunung Slamet. Mengingat tanahnya yang miring ke sebelah selatan, maka seluruh sungai di daerah ini bermata air dari sebelah utara dan bermuara ke sebelah selatan. Untuk keadaan alamnya sendiri dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Dataran Tinggi, terletak di bagian utara yang sebagian diantaranya terletak di kaki Gunung Slamet, yakni meliputi Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, dan sebagian Kecamatan Kutasari. Dataran tinggi bagian utara memiliki kawasan lahan hutan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan lingkungannya.
- b. Dataran Campuran, terletak di bagian tengah, yaitu perpaduan dataran tinggi dan rendah yang sebagian diantaranya terhampar di lembah Sungai Serayu, meliputi Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, dan sebagian Kecamatan Kutasari. Di daerah ini terdapat sawah tadah hujan dan sawah sistem irigasi.
- c. Dataran Rendah, terletak di bagian selatan, yaitu yang terletak di lembah Sungai Serayu, meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kemangkon, dan Kecamatan Kalimanah. Di dataran rendah ini terdapat banyak lahan

pertanian dan permukiman penduduk di tepi aliran sungai, dimana pada musim hujan sering terkena musibah banjir.

Aspek sosial budaya di Purbalingga hampir sama dengan daerah-daerah lain di Jawa. Penggunaan bahasa Jawa dengan logat yang dikenal sebagai *ngapak*, budaya gotong-royong yang sudah turun-temurun, serta masih memegang erat tradisi leluhur. Pengaruh dari masa Mataram Islam (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) juga masih ada, walaupun dewasa ini sudah tidak terlalu terasa. Hal tersebut terutama dalam segi bahasa. Di samping bahasa Jawa dengan dialek Banyumasan (*ngapak*), masyarakat Purbalingga juga mengenal bahasa Jawa dengan dialek Surakarta/Yogyakarta, yang sering disebut *Bandek*. Asal mulanya, saat Kesultanan Pajang menjalin hubungan dengan Purbalingga, di daerah ini banyak *gandek-gandek* (prajurit-prajurit) Pajang pengemban tugas yang berdatangan. Untuk mengadakan komunikasi baik dengan para penduduk maupun rekan-rekan sendiri, para *gandek* itu selalu menggunakan bahasa Jawa logat Yogyakarta/Surakarta yang oleh masyarakat disebut *Bandek* (bahasa *gandek*).

Kehidupan ekonomi Purbalingga sejak dahulu bercorak agraris. Hal tersebut tidaklah mengherankan, sebab Purbalingga memiliki keadaan alam yang mendukung segala jenis pertanian. Baru kemudian saat memasuki masa Orde Baru, perekonomian Purbalingga mulai bergerak menuju kegiatan non-agraris. Bidang yang digerakkan terutama adalah koperasi dan industri serta mulai membuka sarana-prasarana untuk obyek wisata.

3) Telaah Tata Kota

Tata kota Purbalingga pada tahun 1925-1949 diawali oleh diangkatnya Aryo Sugondo sebagai bupati kesembilan. Beliau ini menggantikan bupati sebelumnya, Dipakusuma VI yang tidak lain adalah ayahnya. Dari semua bupati yang pernah menjabat, hanya Aryo Sugondo lah yang mengalami tiga masa pemerintah penting; pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, dan masa awal kemerdekaan Indonesia. Maka dari itulah, penulis mengangkat tema ini karena selain menarik, juga memiliki dinamika yang cukup kompleks, mengingat tata kota kabupaten Purbalingga harus berubah mengikuti keputusan pemerintah.

Seperti kebanyakan kota-kota di Jawa pada abad 19-20 lainnya, Purbalingga memiliki tata letak perkotaan yang sama. Meskipun status Purbalingga pada tahun 1925-1949 bukan sebagai *gemeente* (hanya merupakan *regentschap*) tetapi penataan kota nyaris serupa dengan daerah *gemeente* atau kota administratif lainnya.

Pusat kota mudah dikenali dengan adanya alun-alun sebagai tempat berkumpulnya rakyat. Pohon *waringin* (beringin)

ditanam di tengah-tengah sebagai lambang perlindungan atau pengayoman yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Rumah kediaman bupati dibangun sebelah Selatan atau Utaranya, biasanya dibuat berhadapan dengan rumah asisten residen Belanda (N. Daldjoeni, 1987: 18). Letak-letak bangunan lainnya kemudian mengikuti alur pusat pemerintahan kabupaten. Ada tempat ibadah (biasanya masjid) di sebelah Barat, lalu bangunan-bangunan lain (seperti pasar, kantor pos, penjara dan atau banteng) didirikan sesuai dengan polanya.

Perkembangan tata kota Purbalingga sebetulnya sudah dimulai sejak pemindahan ibukota dari Karanglewas ke Purbalingga pada masa Ki Arsantaka. Saat itu Ki Arsantaka sudah memiliki gambaran mengenai akan seperti apa bentuk kota dari pusat pemerintahan Purbalingga sendiri. Namun, mengingat fokus penulis pada penelitian ini adalah tahun 1925-1949, maka perkembangan tata kota Purbalingga akan dimulai dari masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

Purbalingga yang menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam Karesidenan Banyumas, memiliki *blue print* tentang tata kota yang cukup berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Banyumas. Hal yang cukup mencolok mengenai perbedaan tersebut terletak pada pusat pengawasan kabupaten itu sendiri. Lazimnya, pusat pengawasan akan mengarah dari Selatan ke Utara. Posisi antara rumah bupati dengan asisten residen juga seharusnya berdekatan (berhadapan). Namun, di Purbalingga pola pengawasan adalah dari Selatan ke Timur. Letak rumah asisten residen juga agak jauh dari rumah bupati.

Pusat pengawasan yang sejatinya merupakan *poros sakral* tersebut merupakan poros 1 as, atau 1 sumbu. Pola awal dari tata kota Purbalingga memang dibuat 1 as, mengikuti kabupaten-kabupaten lain di wilayah karesidenan Banyumas. Namun, pola 1 as di Purbalingga tidak mencerminkan sebagaimana harusnya.

Keberadaan bangunan-bangunan bernuansa kolonial juga cukup mudah ditemui sehingga mempermudah analisis tata kota Purbalingga. Beberapa diantaranya yaitu : bangunan *landraad* yang sekarang menjadi pengadilan negeri, rumah asisten residen Belanda yang dihibahkan untuk markas KODIM Purbalingga, bangunan kantor *Regentschaps-raad* yang sekarang digunakan sebagai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, serta bangunan *Indisch School of Kalimanah* yang menjadi SMK Negeri 1 Purbalingga.

Selain bangunan-bangunan tersebut, tata kota Purbalingga juga masih memegang arsitektur khas Jawa. Contohnya terdapat pada bangunan masjid, dan rumah bupati. Percampuran kebudayaan Hindia-Belanda dengan Jawa yang lazim ditemui di

banyak daerah Indonesia, juga cukup banyak tersebar di Purbalingga sendiri.

Sebaran gedung-gedung peninggalan Belanda yang merupakan salah satu hal untuk mendalami telaah tata kota di Purbalingga ini juga diperkuat dengan adanya *Mandala Jawa*. Istilah tersebut digunakan untuk acuan pendirian suatu kota pada masa kuno, khususnya kota-kota di Pulau Jawa. *Mandala Jawa* secara garis besar menjelaskan bahwa kota-kota yang terletak di pesisir utara selalu menghadap utara, sedangkan kota-kota yang terletak di pesisir selatan menghadap selatan. Berkaitan dengan *Mandala Jawa* ini ada teori mistis yang melingkupinya, seperti yang dipercayai oleh masyarakat Yogyakarta terhadap tata kota mereka dengan garis imajiner dari gunung Merapi menuju laut selatan.

Posisi yang mengarah dari Selatan ke Timur di struktur tata kota Purbalingga tahun 1925-1949 ini memang tidak lazim bagi pedoman *Mandala Jawa*. Pedoman tersebut yang kemudian menghasilkan poros sakral Selatan ke Utara (atau bisa juga ditulis Utara-Selatan) dan dikenal sebagai acuan kota-kota Jawa kuno. Dan ketika Belanda masuk ke Purbalingga, selain mengacaukan 'kekuasaan' Jawa, perkembangan tata kota selanjutnya juga menjadi kacau. Terlebih setelah adanya krisis *malaise* yang juga sering disebut *jaman mleset* di tahun 1930-an membuat Purbalingga kehilangan 'wibawa'.

Rumah asisten residen yang letaknya cukup jauh dari pusat kota bukan menjadi satu-satunya kekacauan yang dibuat pemerintah Hindia-Belanda dalam penataan tata kota Purbalingga. Ketika misi *zending* mulai masuk (pengaruh dari adanya politik etis) dan pendeta-pendeta Kristen yang merupakan orang Belanda melihat kekejaman pemerintah Hindia-Belanda terhadap pribumi, tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Sehingga beberapa waktu kemudian mereka mendirikan gereja yang lokasinya tidak jauh dari rumah asisten residen.

Pengaruh dari misi *zending* nyatanya tidak hanya dalam bidang agama Kristen saja, tapi juga tampak dalam bidang medis. Dokter-dokter Belanda yang diprakarsai oleh BJ. Esser dan MW. Stokum mendirikan rumah sakit pertama di Purbalingga, bahkan karesidenan Banyumas, bernama Rumah Sakit Zending di desa Trenggiling (*Trenggiling Zendingenziekenhuis te Purbolinggo*).

Selama masa pemerintahan Hindia-Belanda ini, beberapa sarana-prasarana dan maupun infrastruktur pendukung juga didirikan. Misalnya saja stasiun kereta api, pabrik gula, hingga penanda atau penunjuk jalan yang dulu disebut sebagai *pal*

dalan. Letak penjara di Purbalingga sendiri berhadapan dengan masjid.

Memasuki pendudukan Jepang atas Indonesia, tata kota di daerahdaerah, khususnya Purbalingga, tidak mengalami perubahan. Hal yang berubah hanya terkait dengan sistem pemerintahan dan penyebutan istilah-istilah dari awalnya bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Contohnya adalah penggantian istilah *regent* menjadi *Shico* yang artinya walikota. Kemudian ada istilah *Shi* (pemerintah kota) dan *Shu* (pemerintah karesidenan) untuk menggantikan *gementee* serta *afdeling*. Jadi, selama memerintah di Indonesia, Jepang tidak melakukan perubahan yang langsung terhadap tata kota di Purbalingga. Hanya melakukan penyesuaian saja dengan kultur dan juga propaganda Gerakan 3A yang mereka koarkan.

Indonesia merdeka sampai peristiwa KMB di Desember 1949 menjadi anti klimaks bahasan penulis dalam bab ini. Pengambilalihan infrastruktur yang tersebar di penjuru kota menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Meskipun belum selama rentang waktu empat tahun tersebut tata kota tidak mengalami cukup perubahan, secara legalitas bangunan-bangunan yang awalnya milik pemerintah Hindia-Belanda dan atau Jepang, beralih menjadi milik Indonesia.

Purbalingga pun termasuk daerah yang mengalami kejadian pengambilalihan tersebut. Rumah asisten residen Belanda yang dihibahkan untuk markas KODIM Purbalingga (waktu itu masih tergabung dalam TKR). Gedung *landraad* yang berubah menjadi gedung pengadilan negeri, kantor *regentschap-raad* yang beralih menjadi kantor pemerintahan daerah, hingga rumah sakit zending di Desa Trenggiling juga menjadi rumah sakit negeri Purbalingga.

3. Pengaruh Tata Kota Kabupaten Purbalingga terhadap Kondisi Politik, Sosial, dan Ekonomi Tahun 1925-1949

1) Politik

Undang-undang Desentralisasi Tahun 1903 yang dikeluarkan pemerintah Belanda menjadi penanda dibentuknya pemerintah kota. Pemerintah kota adalah sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kota secara otonom. Pada saat ini lembaga pemerintah kota memiliki wewenang setingkat dengan lembaga pemerintah kabupaten (Purnawan, 2012: 99).

Pada awalnya, undang-undang desentralisasi yang sudah dikeluarkan sejak 1903 tersebut hanyalah sebatas desentralisasi keuangan. Peraturan mengenai desentralisasi pemerintahan daerah baru dikeluarkan pada tahun 1922. Daerah Hindia-Belanda berdasarkan Undang-undang Perubahan (*Bestuurhervormingwet*) tahun 1922 dibagi dalam provinsi dan wilayah (*gewest*) (A.

Daliman, 2012: 80). Pemberian otonomi pemerintahan daerah ini pun diberlakukan secara bertahap. Setidaknya ada 3 daerah yang menjadi provinsi, dan 5 daerah merupakan *gewesten*. Purbalingga sendiri termasuk di dalam provinsi Jawa Tengah, dimana provinsi ini dibentuk pada tahun 1930. Meski sudah ada desentralisasi, hanya daerah yang berstatus provinsi saja yang memiliki otonomi. Sedangkan sisanya yang merupakan daerah-daerah *gewesten* tidak.

Menilik dari apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kota kabupaten adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, bupati (*regent*) bertanggungjawab kepada asisten residen yang merupakan orang Belanda asli. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa gerak-gerik bupati sangat terbatas, karena ketatnya pengawasan yang dilakukan pihak Hindia-Belanda melalui asisten residen. Tahun 1925 bertepatan dengan pengangkatan Aryo Sugondo sebagai bupati kesembilan Purbalingga, sekaligus bupati terakhir dari garis keturunan Ki Arsantaka. Sebab, pemilihan bupati setelahnya tidak lagi dengan trah keturunan, melainkan sudah berdasarkan keputusan pemerintah Republik Indonesia. Pengangkatan putra sulung dari Kanjeng Raden Adipati Dipokusumo VI yang juga bupati sebelumnya ini secara resmi adalah tanggal 29 Oktober 1925. Sukses pemerintahan pada masa Hindia-Belanda adalah dengan mengangkat putra tertua dari istri yang paling tinggi (*istri padmi*) termasuk Aryo Sugondo. Setelah resmi diangkat, ia pun bergelar Raden Mas Tumenggung Aryo Sugondo. Selang beberapa tahun setelah pengangkatan Aryo Sugondo sebagai *regent* kesembilan Purbalingga, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda membagi *regentschap* Purbalingga menjadi tiga kawedanan dan tigabelas kecamatan. Adapun perincian pembagian daerah administratif Purbalingga tersebut yakni :

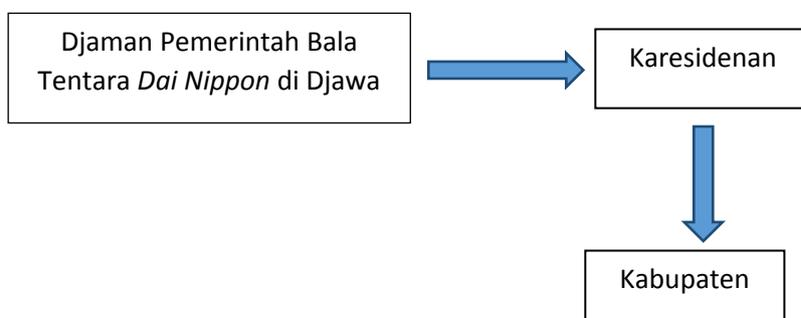
- a. **Kawedanan Purbalingga** dengan patihnya bernama Raden Slamet membawahi lima kecamatan, yaitu : Purbalingga, Kutasari, Kalimanah, Kaligondang, dan Kemangkon.
- b. **Kawedanan Bukateja** dengan patihnya bernama Raden Pujadi membawahi empat kecamatan, yaitu : Bukateja, Kejobong, Karangmoncol, dan Rembang.
- c. **Kawedanan Bobotsari** dengan patihnya bernama Raden Yudoyono membawahi empat kecamatan, yaitu : Bobotsari, Mrebet, Karanganyar, dan Karangreja.

Secara resmi pembagian daerah administratif tersebut juga diumumkan dalam *Staatsblad* (lembaran negara) *van Nederlandsch Indie* no. 2 tanggal 1 Februari 1929, tentang *Binnenlands Bestuur Java en Madoera* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal no. 25 tertanggal 5 Januari 1929. Selain itu Gubernur Jenderal juga mengumumkan pembentukan kembali struktur pemerintahan daerah kabupaten Purbalingga sebagaimana tertuang dalam

Staatsbald van Nederlandsch Indie no. 224 tanggal 24 Juli 1929 tentang *Bestuur Hervorming Decentralisatie Regentchappen Midden Java*. Keputusan ini baru berlaku 1 Januari 1930 (Tri Atmo: 25). Perkembangan pemerintah kota di Purbalingga sendiri selain seperti yang telah diuraikan diatas, juga memiliki anggota-anggota dewan yang tergabung dalam *Regentschap-raad* (dewan kabupaten). RMT. Aryo Sugondo sendiri memegang jabatan sebagai ketua dewan. Anggota *Regentschapraad* ini berjumlah sembilanbelas orang.

Walaupun memiliki pemerintahannya sendiri, selain berada di bawah pengawasan asisten residen, Purbalingga juga menjadi daerah bawahan pemerintahan *gezabeger* yang kemudian berubah menjadi pemerintahan karesidenan. Kedudukan pemerintah karesidenan biasanya di kota-kota yang cukup besar dan membawahi empat sampai enam kabupaten. Bersama dengan kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara, Purbalingga berada dibawah karesidenan Banyumas. Mengacu pada struktur pemerintahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda ternyata memanfaatkan kota-kota yang telah ada sebelumnya sebagai ibu kota pemerintahan yang mereka bentuk. (Purnawan, 2012: 101). Pasca kemenangan Jepang atas Sekutu, berakhir pulalah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia, termasuk Purbalingga. Sehingga, pada tahun 1942, masa pendudukan Jepang dimulai.

Aspek politik selama pemerintahan Jepang cukup memberi perubahan yang signifikan. Beberapa diantaranya adalah pengangkatan orang-orang pribumi asli untuk bekerja di bidang pemerintahan dan juga menduduki posisi yang cukup strategis. Hal yang mencolok ketika masa pemerintahan Jepang adalah penghapusan provinsi dari struktur administrasi pembagian wilayah Indonesia. Penghapusan provinsi tersebut secara langsung maupun tidak membuat posisi karesidenan naik. Secara sederhana pembagian administrasi wilayah Indonesia pada masa pemerintahan Jepang dapat digambarkan dalam bagan ini :



2) Sosial

Masa pemerintahan Hindia-Belanda memberikan pengaruh kolonialisme yang sangat besar di Indonesia, tidak terkecuali Purbalingga. Sebagai salah satu kabupaten di bawah Karesidenan Banyumas, Purbalingga justru mendapat pengaruh kolonial yang paling besar, terutama dalam bidang sosial. Masuknya misi *zending* serta meluasnya politik etis, turut mewarnai kehidupan sosial masyarakat di Purbalingga.

Keadaan sosial masyarakat Purbalingga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain di karesidenan Banyumas, hanya memang dalam aspek sosial lebih terlihat jelas dari kabupaten-kabupaten lain. Pun seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, pemerintah Hindia-Belanda kurang lebih sukses mengacak-acak pola tata kota Purbalingga sehingga menjadikannya kurang berwibawa. Meskipun dampak seperti itu lebih banyak dirasakan melalui aspek politik, nyatanya kehidupan masyarakat awam juga terkena imbasnya.

Pemerintah Hindia-Belanda mengkotak-kotakkan keberadaan masyarakat Purbalingga sama seperti kota-kota lainnya, dimana pribumi atau warga asli berada di posisi terendah. Warga pribumi juga tidak bisa sembarangan berinteraksi dengan orang-orang kelas atas. Hanya tumenggung dan atau elit pegawai pemerintahan saja yang bisa.

Dalam mengadili suatu kasus kejahatan atau kriminal yang mungkin terjadi, pemerintah Hindia-Belanda pun mendirikan *landraad*. Pengadilan pribumi atau *landraad* tersebut memang dikhususkan dibangun di tiap-tiap ibukota kabupaten untuk rakyat pribumi. Seluruh penduduk Hindia-Belanda mesti tunduk pada hukum pidana (*Strafrecht*) sebagai termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP-Wetboek van Strafrecht*). Dalam kitab tersebut sudah termuat jelas apa-apa saja yang tercakup dalam kejahatan dan pelanggaran (A. Daliman, 2012: 80).

Ketika kemudian Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya dan menduduki Indonesia menggantikan pemerintahan Hindia-Belanda, kondisi sosial masyarakat juga tidak banyak berubah, justru lebih memprihatinkan. Masyarakat hidup di dalam ancaman. Bahkan di Purbalingga sendiri pemerintahan masa Jepang lebih dikenal dengan *jaman dung-thang*. Konon istilah tersebut berasal dari bunyi kentongan sebagai tanda atau sinyal peringatan saat tentara Jepang datang ke pemukiman warga. Juga sebagai pencegahan awal agar rakyat bisa bersembunyi dari serangan nyasar. Di beberapa wilayah Purbalingga, *dung-thang* yang berasal dari tabuhan kentongan tersebut juga menjadi pertanda bahwa tentara Jepang akan datang untuk mengambil hasil pertanian dari Pemerintah Jepang

juga sangat disiplin serta tidak pandang bulu terhadap mereka yang tidak bersikap hormat.

3) Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat Purbalingga bertumpu dengan pekerjaan sebagai buruh atau petani. Hanya segelintir saja yang bekerja dengan berdagang. Mereka ini biasanya kaum Timur Asing (Cina dan India). Kegiatan perdagangan sendiri kurang diminati karena selain gerak-gerik pribumi dibatasi, pemerintah Hindia-Belanda tidak menyediakan tempat yang layak sebagai tempat bertransaksi.

Sebelum meluasnya pengaruh politik etis dan *zending* kondisi pasar sebagai sentra kegiatan perdagangan sangat memprihatinkan. Lokasi yang kumuh, atap yang rendah dengan petak-petak kios yang sempit dan kecil. Pemerintah Hindia-Belanda sengaja membangun pasar seperti itu karena tidak ingin warga pribumi pintar berdagang. Maka dari itulah, umumnya pada masa pemerintah Hindia-Belanda, sektor ekonomi perdagangan dikuasai oleh Timur Asing. Selain bekerja di lahan milik sendiri, tidak jarang warga pribumi diharuskan mengikuti kerja rodi oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Walaupun demikian, pemerintah Hindia-Belanda mendirikan pabrik-pabrik gula yang tersebar di seluruh wilayah Karesidenan Banyumas, termasuk Purbalingga, untuk menambah pemasukan. Pabrik gula di Purbalingga sendiri berlokasi di Bojong, dengan areal lahan tebu seluas 2.600 *bau*. Pembangunan pabrik gula ini juga mengangkat ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mereka yang tidak mempunyai lahan untuk bertani, biasanya bekerja sebagai buruh. Ada pula yang menyewakan lahannya untuk ditanami tebu.

Memasuki tahun 1930, dunia mengalami krisis ekonomi global. Krisis ekonomi ini timbul sebagai akibat dari Perang Dunia I. Krisis ekonomi yang juga dikenal sebagai *malaise* atau disebut *jaman mleset* oleh orang Jawa, menjadi pukulan berat bagi seluruh elemen masyarakat, Indonesia, termasuk orang-orang Belanda. Semua kegiatan perekonomian macet, sarana transportasi dan angkutan pun *mandek*, sehingga praktis masyarakat ketika itu sulit memenuhi kebutuhannya. Bagi pemerintah Hindia-Belanda sendiri *malaise* menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, terutama karena kebangkrutan massal. Semua perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta bangkrut.

Pemerintah Militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengeralihan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.

Perkembangan ekonomi dari masa sebelumnya terhenti bahkan kesejahteraan rakyat merosot tajam.

Sektor industri perkebunan yang menjadi andalan utama ekspor pada masa Hindia Belanda mengalami kemunduran drastis. Sektor pertanian rakyat yang bertumpu pada tanaman padi yang sempat mengalami swasembada pada 1940 menurun tajam. Malahan terjadi bencana kekurangan pangan. Hal yang serupa dialami oleh sektor produksi lainnya seperti industri manufaktur, sektor distribusi dan jasa. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam tiga daerah pemerintahan yang berbeda menghancurkan jaringan perhubungan ekonomi yang ada (R.Z. Leirisa, 2012: 85).

Pada masa revolusi kemerdekaan, ancaman kembalinya kekuatan kolonialisme Belanda menyita seluruh perhatian Republik yang masih berusia muda. Sektor-sektor produksi tidak dapat dijalankan sama sekali. Sementara situasi politik dalam negeri masih mencari bentuk yang selaras dengan tujuan bersama ketika itu yakni mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan keadaan masyarakat meletakkan prioritas utama program kabinet pemerintahan pada pemulihan ekonomi, meski dalam kenyataannya program pemulihan itu sulit dilaksanakan.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru banyak disokong oleh partisipasi masyarakat. Kekuatan perjuangan banyak berhutang budi pada penduduk pendesaan yang kerap menyuplai kebutuhan pangan mereka. Kebutuhan perjuangan lainnya diperoleh dengan berbagai cara, seperti penyelundupan dan penyitaan milik musuh.

Secara garis besar, kebijakan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda terhadap aspek politik, sosial, dan ekonomi masih 'mewarisi' kebijakan masa VOC. Adanya kerja rodi (kerja paksa) terutama di sektor pertanian, menjadi ciri khas aspek ekonomi. Kemudian, aspek politik dan sosial masih ada dominasi dari pemerintah Hindia-Belanda. Salah satunya dengan adanya pembagian kelas sosial dan pemberian jabatan yang tidak bisa sembarangan diisi oleh orang pribumi. Memasuki pemerintahan masa Jepang, dan Republik Indonesia, barulah warga pribumi mulai dilibatkan untuk mengisi jabatan.

Kesimpulan

1. Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang berawal dari sebuah desa kecil, namun sudah memiliki eksistensi penting sejak zaman pra-aksara. Berawal dari desa kecil bernama *Mujan*, Purbalingga kemudian berkembang menjadi *kadipaten* pada masa Islam hingga pemerintahan VOC, kemudian menjadi kabupaten (*regentschap*) pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, dan puncaknya berkembang menjadi kota kabupaten saat Indonesia merdeka. Tinggalan-tinggalan bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Purbalingga hingga

sampai seperti sekarang ini (kota kabupaten di Jawa Tengah) masih mudah ditemui. Terutama di bekas pusat desa *Mujan* yang sekarang masuk wilayah kecamatan Bobotsari, desa Onje di kecamatan Mrebet, serta bangunan bergaya Indis di pusat kota Purbalingga.

2. Hasil penelitian mengenai telaah tata kota kabupaten Purbalingga pada tahun 1925-1949 bahwasanya hampir menyerupai ibukota Karesidenan Banyumas yang lama, yakni Kota Banyumas. Pengaruh dari arsitektur gaya Eropa dan Indis juga tampak dalam bangunan-bangunan di sekitar kota kabupaten Purbalingga. Hal menarik yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah, ada kaitan erat antara wawasan *Mandala Jawa* dengan pembangunan struktur tata kota di Purbalingga. Dimana yang seharusnya tata kota Purbalingga benar-benar harus mengikuti *Mandala Jawa*, pada prakteknya yang penulis temui tidak demikian. Ada kecenderungan bahwa pola dalam tata kota di Purbalingga sudah 'diotak-atik' oleh Belanda dengan satu maupun berbagai alasan. Hal ini bahkan juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Contoh utamanya dengan dibangunnya Benteng Vredenburg di pusat kota yang disinyalir sebagai pertahanan Belanda serta untuk mengurangi kewibawaan Sultan. Intervensi Belanda terhadap tata kota di Purbalingga yang menyimpang dari *Mandala Jawa* berhasil membuat tatanan kota menjadi kacau. Terlebih setelah adanya krisis *malaise* yang juga sering disebut *jaman mleset* di tahun 1930-an membuat Purbalingga kehilangan 'wibawa'. Walaupun demikian, selama pendudukan Belanda, cukup banyak sarana-prasarana dibangun untuk menambah produktivitas di Purbalingga sendiri. Infrastruktur berupa gedung pengadilan, rumah kediaman asisten residen, hingga rumah sakit sudah dirintis sejak pendudukan oleh Belanda. Ketika kemudian kekuasaan jatuh ke tangan Jepang, tata kota di Purbalingga juga tidak mengalami perubahan. Hal yang berubah hanya pengambil-alihan fungsi, serta perubahan dalam pembagian wilayah administrasi saja. Pun demikian ketika Indonesia sudah merdeka, tata kota Purbalingga masih belum ada perubahan.
3. Pengaruh tata kota kabupaten Purbalingga terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi tahun 1925-1949 diketahui bahwa tata kota Purbalingga membawa beberapa pengaruh dalam: struktur birokrasi pemerintahan, penyederhanaan pembagian wilayah, pembuatan dasar hukum, hingga kebijakan ekonomi. Masa pendudukan Belanda menjadikan posisi *regent* hanya sebagai simbol saja. Pengawasan tetaplah berada di tangan asisten residen, yang juga ditunjuk langsung oleh Belanda. Sehingga, meskipun suksesi pemerintahan di kabupaten Purbalingga berada di tangan sendiri, Belanda tetap ikut campur. Keadaan tersebut berbeda dengan masa pendudukan Jepang dan pemerintah RI, dimana mereka memutuskan untuk memberdayakan warga pribumi untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan. Namun pengawasan tetaplah berada di pemerintah pusat. Kehidupan ekonomi pada tahun 1925-1949 bisa dikatakan tidak terlalu berhubungan

dengan struktur tata kotanya. Dimana warga pribumi tetap diharuskan mengikuti kerja paksa ketika masa pemerintahan Belanda, *romusha* pada masa pendudukan Jepang, serta membantu TKR dalam pertempuran di Agresi Militer Belanda saat Indonesia baru beberapa bulan merdeka. Masa terberat dalam kehidupan ekonomi di Purbalingga terjadi ketika Krisis Malaise atau yang lebih dikenal *jaman mleset*. Dimana penduduk kesusahan memenuhi kebutuhan, dan bahkan pemerintah Belanda merasa kesusahan dalam menghadapi krisis ini. Aspek sosial yang paling terasa berkenaan dengan tata kota di Purbalingga adalah menyebarnya misi *zending* yang dilakukan Belanda. Penyebaran misi *zending* semakin terasa saat propaganda Politik Etis semakin gencar dilakukan. Contoh utamanya adalah bahwa kemudian di Purbalingga menjadi basis terkuat dalam bidang kesehatan setelah dibangunnya Rumah Sakit Trenggiling. Fasilitas publik tersebut sekaligus menjadi yang pertama dan terbesar di Karesidenan Banyumas, bahkan di kota-kota sekitarnya. Meskipun demikian, tetap ada kelas-kelas sosial yang membatasi lingkup warga pribumi dalam berinteraksi. Kelas-kelas sosial tersebut kurang lebih sama dengan yang selama ini kita kenal, yakni orang-orang Eropa di hierarki teratas, orang-orang Timur Asing di kelas kedua, dan orang-orang pribumi di kelas terbawah. Hal yang cukup berbeda terjadi ketika masa pendudukan Jepang, dimana warga diharuskan bersikap cenderung militer. Jepang juga sangat menjunjung tinggi harga diri, sehingga warga pribumi diharuskan bersikap sopan terhadap Jepang. Bahkan, tidak sedikit warga pribumi yang harus kena hajar karena menyepelekan pihak Jepang.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] Anastasius Daliman. (2012). *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Yogyakarta : Ombak
- [2] Purnawan Basundoro. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta : Ombak.
- [3] Sasono dan Tri Atmo. (1993). *Mengenal Purbalingga (Banyumas)*. Jakarta : Paguyuban Arsakusuma.
- [4] Tim Penulis Pemda Purbalingga dan LPM UGM. (1997). *Sejarah Lahirnya Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga : Dinbudparpora
- [5] Tri Atmo. (Tanpa tahun). *Ki Arsantaka : Pendiri Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
- [6] Dudung Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu

[7] Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 9 Arsip Nasional Republik Indonesia. (1977). *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia

[8] R.Z. Leirissa, dkk. (2012). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Ombak

Arsip

[10] Gubernur Jendral Hindia Belanda, *Staatsblad* tahun 1929 no. 2 : *Binnenlandsch Bestuur Java en Madoera*. (Pemerintah Daerah di Jawa dan Madura). *Nieuwe administratieve indeeling van de gewesten op Java en Madoera*. (Pembagian daerah administratif baru di Jawa dan Madura). *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 5 Januari 1929 No. 25*. (Keputusan Gubernur Jendral Hindia-Belanda tanggal 5 Januari 1929 no. 25).

[11] Gubernur Jendral Hindia Belanda, *Staatsblad* tahun 1929 no. 244 : *Bestuurshervorming Decentralisatie Regentschappen Midden Java*. (Reformasi Pemerintahan Desentralisasi Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah). *Aanwijzing van het regentschap Poerbolinggo als zelfstandige gemeenschap*. (Penunjukan kabupaten Poerbolinggo sebagai daerah yang berdiri sendiri).

Yogyakarta, 12 Juni 2017

Penguji Utama



Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd
NIP. 19770618 200312 2 001

Dosen Pembimbing



Terry Irenewaty, M.Hum
NIP. 19560428 198203 2 003